



Pemda Mesti Tekan Dampak Negatif PTKM

JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY diminta meminimalkan dampak negatif jika akan memperpanjang kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Pemda DIY diminta memodifikasi regulasi.

Lugas Subarkah, Sirojul Khatid, Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

► **Optimalisasi proses di level terkecil tidak harus sampai menutup kampung seperti pada awal pandemi.**

► **Pemda DIY belum menerima surat dari Pemerintah Pusat terkait dengan perpanjangan PPKM.**

Kepala Social Development Studies Centre Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Hempri Suyatna, menekankan dua hal jika PTKM diperpanjang. Pertama, dari sisi protokol kesehatan (proses), perlu optimalisasi lagi satuan tugas sampai level terkecil seperti di desa, pasar, maupun padukuhan. "Sehingga

pengawasan lebih efektif," kata Hempri saat dihubungi secara daring pada Kamis (21/1).

Optimalisasi proses di level terkecil tidak harus sampai menutup kampung seperti pada awal pandemi. Namun lebih pada pengetatan penerapan dan pengawasan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas) pada masyarakat sekitar.

"Ini yang saat ini terasa sudah hilang. Dulu sempat ada tempat cuci tangan di beberapa titik di padukuhan, sekarang sudah pada hilang. Ini contoh kecil. Termasuk pendataan arus mobilitas penduduk yang sekarang juga cenderung cuek," kata Hempri.



Pemda Mesti...

Selanjutnya, perlu juga memperhatikan dampak PTKM pada sektor ekonomi. Perlu ada stimulus khusus bagi para pedagang untuk bisa bangkit, khususnya setelah adanya penurunan omzet sejak PTKM. Salah satu contohnya mempromosikan serta membuat gerakan membeli produk usaha kecil menengah.

"Kalau masih seperti ini, kasihan para pelaku usaha," kata Hemptri. "Ini memang hal yang dilematis karena di sisi lain banyak pelaku usaha yang menggubh karena penurunan omzet mereka."

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menolak perpanjangan kebijakan PTKM. Kebijakan itu telah membuat industri hotel dan wisata terdampak. Tak hanya itu, PTKM juga berpengaruh kepada pengusaha di kawasan Malioboro. Omzet pertokoan di Malioboro anjlok drastis selama PTKM.

Ketua Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY), Sadana Mulyono menguraikan ada tiga faktor yang saling berkaitan penyebab anjloknya omzet para pengusaha. Pemberlakuan PTKM ditambah diberlakukannya Malioboro bebas kendaraan pukul 18.00-21.00 WIB. Hal ini diperparah dengan datangnya musim hujan, sehingga membuat omzet pertokoan Malioboro anjlok sampai 50%.

"Ini [omzet] mungkin drop antara kurang lebih 30 persen-50 persen dengan [di Malioboro] ditutup di malam hari terus, di antaranya itu sudah turun. Terus dibatasi pukul 19.00 WIB, lebih parah lagi. Kemudian juga terjadi karena musim penghujan, kalau musim penghujan kan pasti sepi tidak ada orang lewat," jelas Sadana.

Bahkan, kata Sadana, lebih baik PTKM dibatalkan karena belum terbukti mampu menurunkan jumlah kasus Covid-19. "Diperpanjang ngapain, orang tidak signifikan. Perdagangan sepi, Covidnya juga tidak turun. Justru saran kami harus diketi dengan [pengawasan] keamanan, itu yang ada kerumunan itu langsung ada petugas khusus yang mengingatkan. Dan kalau ada pengunjung atau wisatawan masuk ke Jogja itu diperketat. Apakah membawa surat, baik untuk antigen untuk bebas, negatif. Kalau enggak gitu ya sama saja," ujarnya.

Tunggu Instruksi
Pemda DIY belum menerima surat dari Pemerintah Pusat terkait dengan perpanjangan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, memastikan DIY mau tidak mau harus mengikuti instruksi Pemerintah Pusat.

Tidak bisa tidak, harus ikut. Tapi sampai hari ini [kemarin] belum mendapat suratnya. Kami tunggu instruksinya.

Kadamanta Baskara Aji
Sekda DIY

"Tidak bisa tidak, harus ikut. Tapi sampai hari ini [kemarin] belum mendapat suratnya. Kami tunggu instruksinya," ujarnya, Jumat.

Ia menyadari selama penerapan PPKM, banyak pihak yang dirugikan khususnya pelaku usaha dari pedagang kaki lima (PKL) sampai hotel. Meski demikian ia berharap para pelaku usaha bisa menerima kebijakan ini dengan arif karena demi perbaikan kondisi ekonomi ke depan.

"Kami tahu betul PPKM akan menurunkan pendapatan pelaku ekonomi yang terkait. Kita harus menyikapinya secara arif terkait keputusan ini sehingga bisa menekan betul angka konfirmasi positif kemudian kalau sudah turun kita bisa melakukan aktivitas ekonomi lebih baik lagi," katanya.

Sampai saat ini, kata dia, belum ada skema bantuan atau kompensasi kepada masyarakat yang terdampak PPKM. "Di instruksi belum tahu ya. Tapi kalau saya mendengar dari OJR (Otoritas Jasa Keuangan) sudah memberikan perpanjangan relaksasi kredit," ungkapnya.

Dengan perkembangan kasus Covid-19 harian saat ini, ia melihat PPKM belum bisa menjadi satu-satunya cara untuk mengurangi pertumbuhan kasus positif. Perlu ada kewaspadaan dari masyarakat untuk lebih menjaga protokol kesehatan dan kerumunan baik di tempat umum maupun di lingkungan rumah. "Tetangga dan keluarga dekat juga bisa menjadi sumber penularan. Jadi ini yang perlu hati-hati. Di mana pun berada protokol kesehatan kita laksanakan. Sambil selalu menghindari kerumunan, jalan-jalan di mal dan bioskop dikurangi," ujarnya.

Ketua Hatan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi, menyatakan Penkot Jogja mengikuti kebijakan pemerintahan di atasnya. "Pak Gubernur juga ikut mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Omongin Pemerintah Kota Jogja itu juga akan mengikuti kebijakan itu," katanya. Disebutkan Heroe, meskipun

kasus belum turun secara drastis, tapi memang ada kecenderungan turun. Menurut Heroe, setidaknya tidak ada lagi letupan-letupan kasus tinggi.

Sekda Sleman Harda Kiswaya mengaku siap melaksanakan keputusan Pemerintah Pusat jika diminta ada perpanjangan PTKM di Sleman. Kebijakan PTKM, katanya, bertujuan untuk kebaikan bersama dan melalui berbagai pertimbangan. Meski kasus Covid-19 naik, kata Harda, tanda-tanda penanganan kasus Covid-19 di Sleman terus membaik seiring program vaksinasi yang digulirkan pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo mengatakan dua pekan penerapan PTKM hingga 25 Januari mendatang hasilnya dapat diketahui setelah dua pekan penerapan PTKM. Kasus-kasus baru Covid-19 yang muncul saat ini, merupakan dampak penularan sebelum PTKM. "Bisa jadi akibat libur akhir tahun kemarin, kemudian dinyatakan positif saat ini," ujarnya.

Penambahan Pasien

Penambahan kasus harian di DIY dua hari ini meningkat signifikan. Setelah bertambah 456 kasus pada Kamis (21/1), Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 478 penambahan kasus positif pada Jumat, berdasarkan hasil pemeriksaan pada 1.121 sampel dari 1.055 orang.

Sebanyak 374 kasus dinyatakan sembuh dan lima kasus dilaporkan meninggal dunia.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan penambahan kasus berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (119 kasus), Bantul (97), Kulonprogo (66), Gunungkidul (77), dan Sleman (119).

Dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari 207 kasus positif (299 kasus), periksa mandiri (103), screening karyawan kesehatan (4), pelaku perjalanan luar daerah (1), dan belum ada keterangan (71).

Pasien positif Covid-19 yang dinyatakan meninggal yakni tiga orang warga Bantul, dan masing-masing satu orang warga Sleman dan Kota Jogja. Adapun kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja 100 kasus, Bantul (49), Kulonprogo (2), Gunungkidul (3), dan Sleman (220). Dengan penambahan ini total kasus positif DIY menjadi 18.736 kasus, dengan rincian 5.387 kasus aktif, 12.427 kasus sembuh, dan 422 kasus meninggal. (ANAS/ Haris Rizaki)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 21 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005